

LHKPN Pejabat Instansi tahun 2023 yang telah di verifikasi di tahun 2024 oleh KPK



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
Jl. PAHLAWAN - GRATI PASURUAN 67164
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132
WEBSITE: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiabesar@pertanian.go.id

Nomor : B-594/KP.430/H.5.4/03/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Negara (LHKAN)

19 Maret 2024

Yth,
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan
dan Kesehatan Hewan
di
Bogor

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor: B-127/KP.430/H.1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Lingkup BSIP, berikut kami sampaikan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (terlampir).

Demikian, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Mr. Dicky M. Dikman, M.Phil.
NIP. 197704292006041001

Tembusan:
Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Lampiran Surat Kepala Loka
Nomor : B-594/KP.430/H.5.4/03/2024
Tanggal : 19 Maret 2024

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
TAHUN 2023
LINGKUP LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	49
	a. Wajib LHKPN	6
	b. Tidak Wajib LHKPN	43
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	6
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	43
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0



Surabaya, 19 Maret 2024
Kepala Loka

Dr. Dicky M. Dikman, M.Phil
NIP. 197704292006041001



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIRIN KARYAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 169448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, WARISAN Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	160.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.258.228
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	313.258.228
III. HUTANG	Rp.	71.481.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	241.776.628

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS MIANTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **251324**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **500.000.000**

1. Tanah Seluas 1712 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1310 m2/32 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/71.5 m2 di NEGARA [unknown], HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **8.500.000**

1. MOTOR, HONDA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **53.101****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **508.553.101****III. HUTANG** Rp. **37.158.800****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **471.394.301**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDREAS WIDYO KRISTANTYO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **626846**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **985.020.000**

1. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 139.100.000
2. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 80.700.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 765.220.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **230.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA LEXI S Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO S Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **9.300.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **2.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.226.320.000**

III. HUTANG Rp. **124.960.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.101.360.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : FEBTAVRI NURUL ALL QOMARINI
- Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
- NHK : 628297

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 8.5 m2/14 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 29.000.000

- MOTOR, HONDA X1B02N04L0 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOTOR, HONDA F1C02N46LO AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.186.953

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 899.786.953

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 899.786.953

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DICKY MOHAMMAD DIKMAN**
2. Jabatan : **KEPALA LOKA**
3. NHK : **888490**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/72 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/72 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 512 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/45 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/72 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Tanah Seluas 166 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1385 m²/165 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m²/100 m² di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
9. Tanah Seluas 61 m² di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 600.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT SPORT UTILITY VEHICLE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 39.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	68.437.816
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.767.437.816
III. HUTANG	Rp.	853.176.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.914.261.816

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAYAR
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 908867

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/134 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/190 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	55.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	442.116
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	570.142.116

III. HUTANG Rp. 6.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 564.142.116

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

